

KONSEP KEPERIBADIAN DAN MASYARAKAT IDEAL SEBAGAI BASIS PENDIDIKAN



Oleh : Ibnu Syamsi

**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2010**

KONSEP KEPRIBADIAN DAN MASYARAKAT IDEAL SEBAGAI BASIS PENDIDIKAN

Oleh : Ibnu Syamsi

A. KONSEP KEPRIBADIAN

Konsep kepribadian dapat kita bicarakan dari beberapa pendapat para ahli yang memang menguasai masalah kepribadian. Kepribadian atau pribadi adalah masalah bahasa, akan tetapi secara psikis kedua kata tersebut merujuk pada kedalam jiwa manusia secara individual. Ada kata bijak menyebutkan, bahwa *dalam laut dapat diukur, akan tetapi dalam jiwa manusia siapa yang dapat mengukur*. Apa maksud pernyataan tersebut ? Bahwa untuk mendiskusikan konsep kepribadian tidak akan pernah berakhir dan juga tidak akan pernah berujung. Dalam tulisan ini juga konsep kepribadian akan di diskusikan dengan masyarakat ideal sebagai basis pendidikan. Seandainya kita berbicara mengenai *masyarakat ideal*, sudah barang tentu pikiran kita akan tertuju pada masyarakat sejahtera adil dan makmur. Karena dari masa pendidikan dasar kita sudah disodori dengan konsep masyarakat yang dicita-citakan adalah masyarakat sejahtera adil dan makmur. Begitu juga dengan pendiri bangsa ini yang mencita-citakan, sebuah *masyarakat ideal* yang sesuai dengan filosofis bangsa Indonesia berdasarkan undang-undang dasar yang disepakati secara bersama.

Para ahli mengemukakan konsep kepribadian, menurut Freud kepribadian terdiri dari: rangka struktur kepribadian, dinamika kepribadian, dan perkembangan kepribadian. Struktur kepribadian terdiri dari tiga aspek, yaitu : aspek biologis (*the id*), aspek psikologis (*the ego*), aspek sosiologis (*the super ego*). Aspek biologis merupakan sistem yang original di dalam kepribadian dan dari sinilah kedua aspek lainnya tumbuh. Aspek biologis disebut juga realitas psikis yang sebenar-benarnya (*the true psychic reality*), oleh karena itu aspek biologis ini merupakan dunia batin atau subjektif manusia, dibawa sejak lahir, merupakan reservoir energi psikis yang menggerakkan kedua aspek yang lain.

Sedangkan Lewin memandang pribadi itu selaras dengan prinsip psikologi Gestalt cara menggambarkan pribadi itu secara struktural ialah dengan cara melukiskan pribadi itu sebagai keseluruhan yang terpisah dari hal-hal lainnya yang di dunia ini. Penggambaran ini dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara. Misalnya dengan kata, seperti yang terdapat pada berbagai-bagai teori dan kamus, dapat pula secara ruang (topologis). Lewin memilih cara yang kedua itu karena: (1) penggambaran secara ruang itu memungkinkan pendekatan secara matematis, sedangkan penggambaran dengan kata-kata tidak, (2) penggambaran

dengan kata-kata banyak mengandung keragu-raguan dan karenanya banyak menimbulkan salah mengerti, sedangkan penggambaran secara ruang tidak.

Aspek psikologis (*ego*) menurut Freud, timbul karena kebutuhan individu untuk berhubungan secara baik dengan dunia kenyataan (*realita*), misalnya orang lapar mesti perlu makan untuk menghilangkan tegangan yang ada dalam dirinya. Ini berarti, individu yang bersangkutan harus dapat membedakan antara khayalan tentang makanan dan kenyataan tentang makanan. *Ego* dapat juga dipandang sebagai aspek eksekutif kepribadian, karena itu *ego* ini mengontrol jalan-jalan yang ditempuh. Memilih kebutuhan yang dapat dipenuhi serta cara-cara memenuhinya, dan memilih objek-objek yang dapat memenuhi kebutuhan.

Lewis menamakannya lingkungan psikologis, kalau orang hanya mempersoalkan sifat-sifat pribadi maka dia cukup menggambarkan P sebagai kesatuan yang tertutup itu. Tetapi apabila dia berbuat demikian, maka dia melupakan betapa penting hubungan pribadi itu dengan sekitarnya, dia melepaskan pribadi dari dunianya. Maka langkah selanjutnya untuk menggambarkan kenyataan psikologis itu ialah dengan cara melukiskan gambaran-gambaran tertutup lagi yang lebih besar dari dan melingkupi gambaran P tadi. Juga di sini bentuk dan ukuran tidak penting.

Aspek sosiologi (*super ego*) dalam pandangan Freud, merupakan wakil dari nilai-nilai tradisional dan cita-cita masyarakat sebagaimana ditafsirkan orang kepada anak-anaknya, yang diajarkan dengan berbagai perintah dan larangan. Aspek sosiologi lebih merupakan kesempurnaan daripada kesenangan, karena itu aspek sosiologi dapat dianggap sebagai aspek moral kepribadian. Fungsi pokoknya adalah menentukan apakah sesuatu benar atau salah, pantas atau tidak, susila atau tidak, dan dengan demikian pribadi dapat bertindak sesuai dengan moral masyarakat. *Super ego* diinternalisasikan dalam perkembangan anak sebagai response terhadap hadiah dan hukuman yang diberikan oleh pendidik. *Super ego*, juga kontrol tingkahlaku yang dulunya dilakukan oleh orang tuanya menjadi dilakukan oleh pribadi sendiri, moral yang dulunya heteronom lalu menjadi otonom. Fungsinya dapat dilihat dalam hubungan dengan ketiga aspek kepribadian, yaitu *id*, *ego*, dan *super ego*.

Dinamika kepribadian dalam pandangan Freud, filsafat determinisme dan positivisme banyak mempengaruhi Freud. Ia mengagap organisme manusia sebagai suatu kompleks sistem energi, yang memperoleh energinya dari makanan serta mempergunakannya untuk bermacam-macam hal, seperti sirkulasi, pernafasan, gerakan otot-otot, mengamati, mengingat, berfikir dan sebagainya. Freud menamakan energi dalam bidang psike ini *energi*

psikis. Dalam hukum penyimpangan tenaga, maka energi dapat berpindah dari suatu tempat ketempat lain, tetapi tidak dapat hilang. Berdasarkan pada pemikiran itu Freud berpendapat, energi psikis dapat dipindahkan keenergi fisiologis dan sebaliknya. Penghubung antara tubuh dengan kepribadian adalah *id* dengan instink-instinknya.

Istilah yang sering disamakan dengan instink adalah keinginan dan kebutuhan. Instink adalah sumber perangsang somatis dalam yang dibawa sejak lahir. Keinginan adalah perangsang psikologis, sedangkan kebutuhan adalah perangsang jasmani. Lapar, misalnya dapat tergambar secara fisiologis sebagai kekurangan akan makanan, secara psikologis sebagai keinginan akan makanan. Keinginan itu menjadi alasan bertingkah laku, seperti orang lapar mencari makanan. Individu dapat dirangsang dari luar, Freud beranggapan sumber-sumber perangsang dari luar memainkan peranan yang kurang penting jika dibandingkan dengan instink. Pada umumnya perangsang dari luar lebih sedikit pengaruhnya terhadap individu daripada menghindarkan diri dari perangsang dari luar, tetapi tidak akan dapat melarikan diri dari perangsang dari dalam. Energi-energi psikis adalah instink, kumpulan dari semua instink merupakan keseluruhan dari energi psikis yang dipergunakan oleh kepribadian.

Dalam pandangan pendiri bangsa Indonesia dan para tokoh masyarakat konsep kepribadian itu terdiri dari lima sila, yaitu *Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan, dan Kesejahteraan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia*. Kelima prinsip ini dipandang sebagai suatu pribadi yang utuh yang harus dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dalam pelaksanaannya kelima prinsip ini berjalan bersamaan yang tidak dapat di pisah-pisahkan satu sama lain. Kualitas kepribadian bangsa Indonesia tergantung dari pelaksanaan kelima prinsip ini, semakin berkualitas dalam pelaksanaan prinsip-prinsip ini maka kualitas bangsa Indonesia semakin tinggi dan baik. Banyak yang dapat dibicarakan mengenai konsep kepribadian ini, akan tetapi kita dapat melihat perkembangan konsep kepribadian dalam masyarakat ideal. Oleh karena itu, di bawah ini kita akan melihat apa yang dikatakan masyarakat ideal itu.

B. MASYARAKAT IDEAL

Konsep *masyarakat ideal* yang dimaksud dalam tulisan ini adalah konsep masyarakat madani, yang identik dengan konsep masyarakat yang telah dikembangkan di dunia barat, yaitu *civil society*. Konsep masyarakat madani pada awalnya merupakan tradisi pemikiran barat yang kemudian banyak diadopsi para ilmuwan dan cendekiawan di negara-negara berkembang. Masyarakat madani atau *civil society* adalah bagian dari sejarah Eropa Barat

yang kemudian ditarik menjadi bangunan teori dan paradigma yang dipakai sebagai kerangka untuk memahami perubahan-perubahan sosial di masa transisi dari suatu masyarakat feodal ke masyarakat yang lebih kompleks dan modern. *Masyarakat ideal* adalah impian setiap orang yang berkembang dalam benak setiap individual. Masyarakat tersebut menginginkan konsep kehidupan yang madani dan berkembang secara alamiah tanpa ada tekanan-tekanan.

Dalam konsep *masyarakat ideal* atau masyarakat madani juga merupakan sebuah paradigma dan bangunan teoritik, sebagaimana setiap rumusan yang berbentuk pola, ia bisa menjelaskan semua yang terjadi. Perubahan istilah tersebut lahir dari pemikiran feodal ke pemikiran yang lebih modern. Model atau pola dibuat dan diciptakan untuk kepentingan masyarakat, kehendak politik dan ekonomi banyak mempengaruhi kemauan-kemauan yang ada dalam masyarakat ideal atau masyarakat madani yang rumit. Konsep ini merupakan bagian dalam tatanan bernegara, apabila dilihat dalam bentuk yang sederhana. Konsep ini juga beroperasi dalam ranah ekonomi, komunikasi, politik, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kultural. Perbedaan ragam dalam konsep ini dapat dikatakan sebagai pengendali dalam melakukan tindakan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan.

Masyarakat ideal atau masyarakat madani dalam perkembangan berikutnya, ternyata banyak diadopsi oleh para ilmuwan dan cendekiawan di negara-negara berkembang. Dalam masyarakat kita, ide masyarakat ideal (madani) mulai banyak diperbincangkan pada akhir-akhir ini, setelah lahirnya era reformasi dalam masyarakat. Sistem kenegaraan kita mulai mengarah ke tatanan masyarakat madani, dalam prosesnya banyak kendala yang saling bertabrakan dalam komponen-komponen masyarakat itu sendiri. Kepentingan kelompok yang ada dalam masyarakat saling berebut untuk menempatkan kepentingan itu sendiri dalam masyarakat. Fungsi kelompok-kelompok dalam masyarakat akan menempatkan kelompok itu sendiri sesuai dengan kedudukan. Semuanya akan bersifat naturalistik tanpa ada rekayasa dari tangan-tangan tertentu.

Masyarakat ideal atau madani dalam perspektif barat adalah suatu gagasan yang mereka namakan *civil society* sebagai suatu produk sejarah, yaitu sejarah masyarakat Barat. Dalam sejarahnya, masyarakat madani mengalami berbagai model pemaknaan, seiring dengan dinamika pemikiran serta keragaman konteks kesejarahan tempat pemikiran itu dilahirkan. Pembicaraan mengenai masyarakat madani, sejak masa yang lalu hingga masa modern, secara hirarki berporos pada lima model pemikiran.

Para pakar seperti, Aristoteles, Marcus Tullius Cicero, Thomas Hobbes, John Locke yang pertama mengatakan, masyarakat ideal atau madani istilah yang paling kuno, masyarakat ideal atau madani dipahami sebagai sebuah sistem kenegaraan. Masyarakat madani saat itu identik dengan negara. Aristoteles tidak memakai istilah masyarakat madani pada saat itu, akan tetapi *koinonie politike*, yakni sebuah komunitas politik tempat warga negara terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan. Cicero menamakan dengan istilah *societas civilis*, yaitu suatu komunitas yang mendominasi sejumlah komunitas lainnya. Thomas Hobbes dan John Locke memahaminya sebagai tahapan lebih lanjut dari evolusi natural society, Hobbes harus memiliki kekuasaan absolut agar mampu sepenuhnya mengontrol pola-pola interaksi warga negara. Locke, kehadiran masyarakat madani ditujukan untuk melindungi kebebasan dan hak milik warga negara. Oleh karena itu masyarakat madani tidak boleh absolut. Masyarakat madani harus membatasi perannya pada wilayah yang tidak bisa dikelola masyarakat, dan memberi ruang yang wajar bagi warga negara untuk memperoleh haknya secara wajar pula.

Kemunculan masyarakat madani, dimaksudkan untuk meredam konflik dalam masyarakat sehingga masyarakat tidak jauh pada situasi chaos. Masyarakat madani menurut (Hobbes), harus memiliki kekuasaan absolut agar mampu sepenuhnya mengontrol pola-pola interaksi warga masyarakat. Sedangkan Locke, kehadiran masyarakat madani ditujukan untuk melindungi kebebasan dan hak milik warga masyarakat. Oleh karena itu masyarakat madani tidak boleh absolut. Masyarakat madani harus membatasi peranannya pada wilayah yang tidak bisa dikelola masyarakat, dan memberi ruang yang wajar bagi warga negara untuk memperoleh haknya secara wajar pula.

Para pakar hukum alam, mendapatkan inspirasi dalam mengembangkan konsepsinya mengenai masyarakat madani, terutama Grotius, John Locke, dan dotrin Kristiani. Konsep ini dihubungkan dan dikembangkan Locke dalam pemikirannya yang lebih luas tentang masyarakat dan politik. Pemahaman mengenai konsep masyarakat madani, Locke menghubungkan, bukan dilawankan, dengan keadaan alami (state of nature) manusia. Dalam state of nature, menurut Locke, manusia hidup diatur oleh hukum alam di mana hak-haknya masih tetap dijamin. Manusia dengan kapasitasnya masing-masing sebagai individu dan berpijak pada akalnyanya, masih dapat menciptakan hubungan damai. Manusia secara individual dilihat sebagai wakil Tuhan. Pawai dalam masyarakat pun dianggap dianggap bersumber dari Tuhan, di mana manusia saling berhadapan tanpa nafsu menguasai ataupun nafsu untuk membatasi kekuasaan satu sama lain.

Maksudnya masyarakat ke dalam tahap masyarakat madani atau masyarakat bernegara yang didahului perjanjian sosial atau social contrac, merupakan tahap yang tidak dapat dielakkan untuk mempertahankan kondisi tingkahlaku etis, di mana anggota masyarakat bertekad hidup bersama dengan aturan yang mereka hormati sebagai warga yang mengharapkan hak-hak kemanusiaan. Jadi, bentuknya berupa masyarakat madani atau negara, bagi Locke, adalah produk kontrak sosial tersebut, yang gunanya tidak lain untuk mendapatkan jaminan kepastian daripada semata-mata hanya menguntungkan keselamatan dalam hukum alam yang abstrak.

Konsep tentang kontrak sosial ini kemudian dikembangkan oleh rousseau. Walaupun rousseau memiliki pemikiran yang berbeda dengan Locke dalam menjelaskan konsep ini, namun pada dasarnya kedua pemikir ini sama-sama ingin menggambarkan suatu bentuk masyarakat beradab yang dicita-citakan, yang menjamin kehidupan anggotanya di bawah aturan sipil. Namun demikian, baik konsep Locke maupun rousseau belum membedakan antara masyarakat madani dan masyarakat politik. Bahkan masyarakat madani masih dianggap sebagai negara dan sekali gus pemerintahan sipil itu sendiri, dan dibedakan dari kehidupan state of nature sebelumnya yang tanpa pemerintahan, yang belum mengenal kehidupan bernegara.

Abad kedelapan belas, Adam Ferguson memberikan tekanan lain terhadap makna masyarakat madani. Dalam konteks sosial politik Skotlandia yang tengah menghadapi kemunculan kapitalisme dan pasar bebas sebagai eksese revolusi industri, membuatnya khawatir akan membuat lunturnya tanggung jawab sosial masyarakat dan menguatnya individualisme. Oleh karena itu (Ferguson) lebih memaknai masyarakat madani sebagai visi etis dalam kehidupan bermasyarakat untuk memelihara tanggung jawab sosial bercirikan solidaritas sosial dan terilhami oleh sentimen moral serta sikap saling menyayangi antar warga secara alamiah. Masyarakat madani lebih dipahami sebagai kebalikan masyarakat primitif atau masyarakat barbar. Ferguson dalam buku *An Essay on History of Civil Society* menggambarkan tentang perubahan sejarah alami manusia dari masyarakat primitif yang kasar ke dalam masyarakat bernegara yang beradab.

Masyarakat madani, oleh Ferguson masih diidentikan dengan negara, digambarkan sebagai sebuah bentuk tatanan politik yang melindungi dan memperadabkan pekerjaan-pekerjaan manusia seperti seni, budaya dan spirit publiknya, peraturan-peraturan pemerintah, rule of law, dan kekuatan militer. Model masyarakat madani ini, menurut Ferguson, telah

terwujud dalam negara-negara kota kuno seperti Yunani dan Republik Roma. Di zaman modern, peradapan ini terwujud melalui kemajuan industri yang menurut pembagian kerja dan orientasi profit.

Dalam tahap ketiga Thomas Paine mulai memakai masyarakat madani dalam posisi diametral dengan negara, dan bahkan masyarakat madani dinilai sebagai antisintesis atas negara. Negara harus dibatasi sampai sekecil-kecilnya, karena keberadaannya hanyalah keniscayaan buruk belaka. Baginya, masyarakat madani harus lebih kuat dan mampu mengontrol negara demi keperlunya.

Dalam karya Paine merefleksikan semangat Revolusi Amerika, dengan seklarasi hak-hak azasi manusia dan prinsip kedaulatan rakyat sebagai prinsip dasar konstitusi, hak-hak perlawanan terhadap pemerintah yang menyimpang dari hukum, dan implementasi struktur politik federal. Paine mengatakan, kekuasaan negara perlu dibatasi campur tangannya ke dalam wilayah masyarakat madani agar setiap individu di dalam masyarakat dapat saling berinteraksi secara kompetitif dan membangun solideritas berdasarkan kepentingan timbal-balik beserta tujuan bersama. Legitimasi kekuasaan negara didasarkan pada keinginan masyarakat untuk mencapai kepentingan bersama.

Dengan melihat pada contoh pengalaman Revolusi Amerika, Paine menekankan pentingnya hak perlawanan masyarakat atas eksese kekuasaan negara. Negara merupakan hasil persetujuan atau konsensus antar individu, dan karena itu legitimasinya dapat saja dipersoalkan. Individu lahir ke dunia dengan kodrat kemanusiaannya yang sama, yang memiliki hak-hak alamiah sama seperti kebebasan berbicara, berserikat dan beragama, sesuatu yang merupakan bagian dari pemberian Tuhan yang tidak dapat dibatasi dan didukung oleh negara.

Lebih dalam lagi Paine melihat bahwa negara bukanlah sesuatu yang kompok antara yang memerintah dan yang diperintah. Negara dianggap beradab atau legitimated hanya jika dibentuk melalui persetujuan antar individu secara eksplisit, yang dibentuk melalui persetujuan aktif secara kinstitusional yang dicapai dan dipertahankan melalui mekanisme perwakilan atau parlemen.

Model ini membuat Hegel lebih terpancing lagi dan mendorongnya untuk mengembangkan konsep masyarakat madani yang subordinatif terhadap negara, yang merupakan model keempat. Pemahaman Hegel atas konsep masyarakat madani, menurut

Ryass Rasyid, sangat kuat berhubungan dengan fenomena masyarakat borjuis Eropa yang pertumbuhannya ditandai oleh perjuangan untuk melepaskan diri dari dominasi negara.

Lebih jauh Hegel, struktur sosial terbagi atas tiga entitas, yaitu keluarga, masyarakat madani, dan negara. Keluarga adalah ruang sosialisasi pribadi sebagai anggota masyarakat yang berciri keharmonisan. Sedangkan masyarakat madani merupakan tempat berlangsungnya konflik pemenuhan kepentingan pribadi atau kelompok, terutama kepentingan ekonomi. Ia bukanlah wilayah praktis politik, karena praktis politik hanya monopoli negara. Sementara negara adalah representasi ide universal yang bertugas melindungi kepentingan politik warganya dan berhak penuh untuk melakukan intervensi ke dalam masyarakat madani. Dengan demikian masyarakat madani, menurut Hegel, adalah entitas yang cenderung melumpuhkan diri sendiri, dan karenanya memerlukan santunan negara melalui kontrol hukum, administrasi dan politik.

Pemikiran Hegel sebenarnya merupakan reaksi atas tuntutan kemandirian masyarakat madani pada zamannya yang ia khawatirkan akan merusak kesatuan negara. Latar belakang ini yang menyebabkan gagasan masyarakat madani dalam pemikiran Hegel kehilangan arti positif, karena membutuhkan supervisi dan kontrol administrasi negara. Dalam konteks ini, intervensi negara ke dalam wilayah masyarakat, bagi negara adalah pemilik ide universal, dan hanya pada dataran negara lah politik bisa berlangsung secara murni dan utuh. Selain itu, masyarakat madani modern pada kenyataannya tidak mampu mengatasi kelemahan sendiri, serta tidak mampu mempertahankan keberadaannya tanpa keteraturan politik dan ketertundaan pada institusi yang lebih tinggi, yakni negara.

Dua alasan pokok yang dikemukakan oleh Hegel mengenai pentingnya intervensi negara ke dalam masyarakat madani. Pertama, jika terjadi situasi ketidakadilan dan ketidaksederajatan, seperti karena adanya dominasi kelas yang satu atas yang lain, dalam masyarakat sehingga perlu di atasi. Yang kedua, jika terjadi sesuatu yang mengancam kepentingan universal masyarakat sehingga tindakan perlindungan atas kepentingan tersebut sangat diperlukan. Tentu saja, dalam konteks ini adalah kepentingan universal itu sesuai dengan yang didefinisikan oleh negara.

Menggagas konsepsi Hegel tersebut, Manfred Heningsen menilai bahwa dalam tradisi pemahaman politik Jerman, daerah asal Hegel, negara memang merupakan pusat dari proses dan praktik penguasaan. Sementara masyarakat dinilai sebagai realitas yang tidak teratur dan penuh kontradiksi sehingga memerlukan pengendalian negara.

Kelima, sebagai reaksi atas model Hegelian, Alexis De Toqueville, berdasarkan pengalaman demokrasi di Amerika, mengembangkan teori masyarakat madani yang dimaknai sebagai entitas penyeimbang atas kekuatan negara. Di Amerika, demokrasi pada awal pembentukannya dijalankan melalui masyarakat madani, yakni berupa pengelompokan sukarela dalam masyarakat, termasuk gereja dan asosiasi profesional, yang gandrung membuat keputusan pada tingkat lokal dan menghindari intervensi negara.

Gagasan Toqueville bertolak dari kekhawatirannya akan bahaya pemusatan kekuasaan negara terhadap masyarakat. Sehingga Toqueville menekankan pentingnya penciptaan asosiasi-asosiasi warga negara yang mandiri. Karena menurutnya, hanya melalui cara demikian maka penyalahgunaan kekuasaan oleh negara yang menindas kebebasan warganya dapat dicegah. Memang negara yang aktif dan kuat diperlukan bagi demokrasi, tetapi bukan berarti bahwa demokrasi harus dibina oleh institusi politik negara. Demokrasi hanya dapat tumbuh dan berkembang dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat madani. Melalui kontrol masyarakat madani, maka despotisme atau monopoli kekuasaan negara dapat dicegah.

Peringatan Toqueville yang utama adalah bahwa despotisme negara tak dapat dilawan kecuali jika warga negara mengkonsolidasi diri dan bekerja sama melalui asosiasi-asosiasi yang bebas yang mereka ciptakan di luar negara. Peringatan ini intinya berdasarkan pada prinsip demokrasi. Demokrasi tidak dapat diharapkan hanya melalui kemauan baik negara dalam kerangka pengarahan institusionalnya. Karena itu, adanya masyarakat madani yang dapat mengatur dirinya sendiri dan yang dapat mengekspresikan pluralitasnya merupakan jaminan bagi demokrasi. Penyatuan masyarakat madani dengan negara, karena itu pula, adalah ancaman bagi demokrasi, dan selanjutnya hanya akan mengarah pada timbulnya despotisme negara.

Dalam pandangan Toqueville, masyarakat madani seharusnya tidak subordinatif terhadap negara, sebagaimana konsep Hegelian. Ia bersifat otonom dan memiliki kapasitas politik cukup tinggi sehingga mampu menjadi kekuatan penyeimbang untuk menahan kecenderungan intervensi negara, dan pada saat yang sama mampu melahirkan derajat konflik dalam masyarakat sebagai akibat proses formasi sosial modern. Masyarakat madani tidak hanya berorientasi kepada kepentingannya sendiri, tetapi juga sensitif terhadap kepentingan publik.

Model Toqueville inilah yang menjadi inspirasi bagi gerakan-gerakan prodemokrasi di Eropa Timur dan Eropa Tengah pada akhir dasawarsa 1980-an. Pengalaman di dua

kawasan ini membuktikan bahwa justru dominasi negara atas masyarakat lah yang melumpuhkan kehidupan sosial mereka. Di sini, gerakan membangun masyarakat madani menjadi perjuangan untuk membangunkan harga diri mereka sebagai warga negara. Gagasan warga negara menjadi semacam landasan ideologis untuk membebaskan diri dari cengkraman negara yang secara sistematis melemahkan daya kreasi dan kemandirian mereka.

Dalam pengalaman demokrasi di Eropa Timur, tuntutan akan terciptanya masyarakat madani yang mandiri sesungguhnya menjadi tujuan yang diperjuangkan oleh gerakan-gerakan prodemokrasi. Cendekiawan, buruh, petani dan elemen-elemen masyarakat lain yang berkepentingan terhadap demokrasi sepakat bahwa dalam suatu masyarakat pasca totaliter, memang tidak mungkin kedua elemen tersebut ditumbangkan secara murni. Tetapi, dengan pemusatan kekuasaan negara secara berlebihan sebagai perpanjangan tangan partai, maka posisi warga negara sebagai individu-individu menjadi marjinal. Kontrol ketat negara atas alat produksi, media masa, organisasi politik dan kemasyarakatan, serta keagamaan juga mematikan esensi demokrasi baik dalam wujud wacana sosial, politik, kultural maupun ekonomi.

Model terakhir ini kemudian diperkaya oleh Hannah Arendt dan Juergen Habermas dengan konsep ruang publik yang bebas. Ruang publik secara teoritik bisa diartikan sebagai wilayah di mana masyarakat sebagai warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik. Warga negara berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul, serta mempublikasikan penerbitan yang berkenaan dengan kepentingan umum. Institusional ruang publik, menurut Habermas, antara lain berwujud media massa, sekolah, gedung-gedung pertemuan umum, dan parlemen.

Upaya menciptakan ruang publik yang bebas ini, bagi Arendt, merupakan prasyarat untuk menciptakan sebuah masyarakat politik yang mampu melawan totaliterianisme negara. Sebab hanya dalam ruang publik yang bebas lah, sebuah tindakan politik yang sebenarnya, yakni yang mampu mengangkat harkat kemanusiaan dapat terwujud. Hanya dalam ruang publik yang bebas, secara normatif setiap individu dalam posisi yang setara dapat melakukan transaksi wacana dan praksis politik secara sehat, tanpa distorsi dan represi, baik secara fisik maupun psikis. Dengan demikian terwujudnya ruang publik yang bebas merupakan elemen utama dalam perjuangan mewujudkan masyarakat madani.

Berbagai pandangan para ilmuwan Barat di atas telah menempatkan masyarakat madani sebagai sebuah kajian menarik. Namun demikian hal tersebut mungkin masih

membutuhkan setuhan-sentuhan baru dari kalangan lain, ilmuwan Muslim misalnya, dalam upaya membumikan konsep tersebut pada realitas masyarakat suatu negara, khususnya Indonesia. Dari uraian berikut, diharapkan akan dipahami secara proporsional dalam konteks politik Indonesia, melalui upaya konseptualisasi masyarakat madani di kalangan intelektual Muslim Indonesia. Karena masyarakat madani merupakan sebuah konsep dinamis, maka ia bisa dimaknai oleh berbagai kalangan ilmuwan secara bebas tergantung setting, konteks, dan kepentingan setiap subjek.

C. BASIS PENDIDIKAN

Orientasi sebagai gerakan kultural yang diterjemahkan pada praktis sosial, terutama bidang pendidikan dan pelayanan sosial sebenarnya bukanlah hal yang baru dalam masyarakat. Sejak awal masyarakat mencoba mengatasi persoalan yang membelit masyarakat saat ini, yaitu kebodohan dan keterbelakangan, melalui jalur pendidikan. Sehingga, bidang pendidikan menjadi program unggulan dari kelompok-kelompok masyarakat dalam meningkatkan kecerdasan masyarakat. Paradigma itu terlihat jelas dari masa ke masa, dan perkembangan masyarakat bergerak ke arah masyarakat profesional. Apa lagi akhir-akhir ini, masyarakat kita terlihat agak tertinggal dari masyarakat belahan lain, sehingga dicari sistem baru untuk mengejar ketertinggalan itu.

Melalui pengembangan sektor pendidikan, masyarakat dapat menarik peserta didik dari kalangan kelompok-kelompok masyarakat. Sebagai konsekuensinya, terjadi mobilitas sosial vertikal besar-besaran dalam masyarakat dari masa ke masa, dimana kelompok masyarakat banyak terserap ke dalam jenis-jenis profesi modern, pendidik, intelektual, birokrat, bisnis, wartawan, dan sebagainya. Dengan kata lain, jalur pendidikan yang menjadi orientasi utama masyarakat telah memberikan kontribusi cukup besar bagi hadirnya masyarakat kelas menengah baru di Indonesia.

Memang harus diakui, bahwa orientasi non politik masyarakat akan dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk lebih mengembangkan usaha masyarakat. Dengan jaringan organisasi yang terbesar di seluruh nusantara, dari tingkat pusat hingga tingkat bawah, masyarakat merupakan kelompok-kelompok yang mapan dalam pengembangan dunia pendidikan. Ini bisa dilihat besarnya usaha bidang pendidikan yang berkembang dalam masyarakat. Baik pemerintah maupun swasta, berusaha sekuat tenaga mengembangkan masyarakat secara kuantitas dan kualitas melalui bidang pendidikan ini.

Seluruh amal usaha bidang pendidikan ini pada umumnya berdiri atas inisiatif lokal, berdasarkan kebutuhan setempat, dan dibangun dengan swadaya masyarakat. Masyarakat bersama-sama pemerintah membangun pendidikan, dalam rangka mencari cara yang terbaik untuk memajukan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. Dengan tercipta suatu sistem pendidikan yang berkualitas, tentu akan membawa masyarakat pada suatu era yang diinginkan dan di cita-citakannya. Dalam undang-undang dasar kita, masyarakat yang diinginkan adalah masyarakat adil dan makmur berdasarkan falsafah negara, yaitu *Pancasila*. Banyak makna dan dalam maknanya, apa yang terkandung dalam falsafah negara tersebut dan tidak akan di dalam serta dilanjutkan dalam tulisan ini.

Hingga saat ini bidang pendidikan masih merupakan pilihan utama bagi masyarakat untuk melakukan pemberdayaan. Melalui pendidikan, masyarakat berusaha aktif untuk melakukan terobosan-terobosan ke arah pencerahan intelektual, membebaskan masyarakat manusia dari ikatan-ikatan primordial-tradisional yang kaku, budaya feodalisme yang membelenggu masyarakat. Masyarakat menyadari pentingnya dunia pendidikan sebagai langkah investasi sumber daya manusia yang hasilnya tidak dapat dirasakan dalam waktu sekejap. Dalam jangka panjang dan lama pekerjaan ini akan terasa dinikmati oleh anak cucu kelak dalam rangka persaingan global yang terjadi di dunia saat ini.

Masyarakat memandang bahwa perubahan nasib umat manusia hanya mungkin dicapai apabila umat tersebut memperoleh akses yang seluas-luasnya ke dalam dunia pendidikan. Pendidikan yang mencerahkan dengan sendirinya akan menghapuskan segala bentuk penyimpangan atas rasionalisme, seperti kepercayaan terhadap dunia lain. Pendidikan menjadi lembaga modern yang sengaja dipilih oleh kelompok-kelompok masyarakat masa penjajahan untuk menghapus keterbelakangan dan kebodohan masyarakat kita. Mengelola kehidupan manusia mulai dari lahir sampai kembali ke alam baka memerlukan keahlian profesional, pekerjaan ini dikatakan dengan seni mendidik. Boleh juga dikatakan, bagaimana menghantarkan seorang anak ke masa kedewasaannya.

Gagasan pembaharuan yang berkembang dalam masyarakat, pada dasarnya merupakan rasionalisasi yang berhubungan dengan ide mengenai perubahan sosial dari masyarakat agraris ke masyarakat industri, atau dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Dilihat dari segi ini, sangat jelas bahwa masyarakat telah memberikan ideologi baru dengan suatu pembenaran teologis untuk memperlancar transformasi sosial menuju masyarakat kota, industrial, dan modern. Tampaknya masyarakat memang mengidentifikasi

diri untuk cita-cita semacam itu. Upaya masyarakat untuk melakukan persiapan ke arah transformasi itu misalnya adalah dengan melepaskan beban-beban kultural yang sampai sejauh itu dianggap dapat menghambat kemajuan.

Sistem sekolah yang diselenggarakan masyarakat adalah contoh yang paling jelas dari usaha tersebut. Masyarakat menyadari bahwa untuk hidup di dalam masyarakat industrial, orang harus belajar melalui pendidikan formal yang mengajarkan ketrampilan-ketrampilan tertentu. Peluang semacam ini hampir tidak dapat diperoleh dari sistem pendidikan tradisional. Pendidikan dalam masyarakat berusaha memenuhi pasaran kerja baru dalam birokrasi, industri, pendidikan, perdagangan, dan sebagainya. Tampak sekali bahwa pendidikan masyarakat memang hendak menjangkau lingkungan pemasaran modern. Itulah sebabnya sulit membayangkan dapat munculnya golongan masyarakat terpelajar yang siap menghadapi kehidupan modern tanpa adanya sekolah-sekolah tradisional.

Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat adalah pendidikan yang telah mengalami proses modernisasi pada zamannya, baik dalam sistem pengajaran maupun kurikulum pelajaran. Modernisasi itu berupa penggunaan sistem penjejangan kelas – yang tidak dikenal dalam sistem pendidikan tradisional, serta kurikulumnya memadukan pengetahuan umum dengan pengetahuan agama. Angkatan muda lulusan sekolah model ini, akan memiliki bekal yang cukup untuk berpartisipasi dalam pasaran kerja yang terus meningkat.

Salah satu bentuk mobilitas sosial vertikal itu adalah terserapnya secara besar-besaran masyarakat yang berkualitas kedalam birokrasi pemerintahan. Integrasi birokrasi adalah perubahan perilaku politik yang merupakan aktualisasi dari konsep sosial yang berubah dan berkembang sesuai dengan sistem pendidikan dari masa ke masa. Mobilitas sosial yang berkualitas akan terjadi bila mutu pendidikan dapat terjamin, sesuai dengan standar-standar nasional dan internasional yang telah ditetapkan. Kualitas pendidikan akan menjamin peningkatan mutu masyarakat yang akan bermobilitas secara terus menerus.

Integrasi kelompok-kelompok masyarakat secara modernisasi kedalam birokrasi sesungguhnya tidak dapat dikatakan sebagai hasil dari rekayasa suatu rizim untuk mengkooptasi kelompok masyarakat, melainkan merupakan konsekuensi logis belaka dari modernisasi sistem pendidikan yang ada dalam masyarakat yang turut dipelopori oleh tokoh-tokoh masyarakat. Generasi muda yang lahir dari sistem pendidikan modern tersebut kemudian memasuki lapangan birokrasi sebagai pegawai negeri. Melalui lobi-lobi yang

dibangun oleh kelompok-kelompok masyarakat menciptakan saluran lobi untuk mendesakkan berbagai aspirasi dan kepentingannya. Sehingga, meskipun masyarakat belum pernah menjadi partai politik, akan tetapi organisasi masyarakat tidak akan pernah absen dalam percaturan politik nasional.

Keberhasilan model politik masyarakat dan kemampuan anggotanya yang memasuki lapangan birokrasi negara telah membangkitkan mobilitas umat manusia untuk memasuki lapangan-lapangan modern. Keberhasilan ini kemudian diikuti oleh banyak kelompok masyarakat, termasuk organisasi masyarakat yang lainnya. Juga terjadi persaingan yang sangat ketat dalam masyarakat untuk memacu keteringgalan-keteringgalannya. Terkadang terjadi persaingan yang kurang sehat dan gesekan-gesekan yang agak memanas, dan bisa terjadi konflik horizontal dalam masyarakat.

Masyarakat dapat dikatakan sebagai raksasa dalam dunia pendidikan Indonesia. Jumlah lembaga pendidikan yang dimiliki hampir bertebaran ke seluruh pelosok Nusantara. Besarnya jumlah lembaga pendidikan ini membuat organisasi-oraganisasi masyarakat memiliki basis pengembangan sumber daya manusia yang melimpah. Diantara mereka terdapat ribuan tokoh-tokoh masyarakat yang menyandang gelar doktor dan magister di berbagai bidang pendidikan, hukum, politik, ekonomi, antropologi, sejarah dan sebagainya. Mereka siap diterjunkan ke dunia kerja, sesuai dengan bidangnya masing-masing dan akan bekerja secara profesional dalam rangka mengembangkan masyarakat yang akan datang.

Sementara itu, lahirnya gelombang pengkaderan yang berlatar akademis sekali gus menandai beralihnya tipologi kepemimpinan masyarakat, dari tipe yang lebih kuat ke tipe yang lebih kuat intelektualitasnya. Silih bergantinya tokoh-tokoh masyarakat yang lahir dari masa ke masa membawa masyarakat ke arah yang lebih cerdas dan mampu bersaing dalam era globalisasi. Disamping itu, pergeseran tipologi kepemimpinan ini juga diiringi dengan beralihnya peran-peran strategis dari generasi tua kepada generasi yang lebih muda. Setidaknya pada masa sekarang, peranan generasi muda jauh lebih besar daripada masa sebelumnya.

Mulai tergesernya pengaruh tradisonal dan generasi tua dalam kepemimpinan masyarakat, dan ini akan mempengaruhi bentuk kepemimpinan masyarakat. Tipologi kepemimpinan tokoh-tokoh masyarakat betul-betul mencerminkan latar belakang mereka sebagai cendikiawan yang independen. Apalagi, sebagian besar kelompok-kelompok masyarakat masa sekarang lebih dekat kepada kategori intelektual. Sikap kritis mereka

membawa organisasi masyarakat dari masa lalu masuk kedalam arus utama yang menyuarakan kritik-kritik sosial dan perlunya reformasi, serta menjadi kekuatan kontrol terhadap kekuasaan negara selama era reformasi, tanpa sedikitpun memperoleh tantangan dari dalam organisasi masyarakat.

Kecenderungan menguatnya kepemimpinan masyarakat tipologi intelektual ini tampaknya akan terus berlangsung di masa depan. Ini bukan disebabkan karena konsekuensi logis dari pilihan masyarakat sebagai gerakan yang mengutamakan bidang pendidikan, tetapi juga mengingat semakin besarnya tantangan masyarakat di masa depan, dalam konteks nasional dan global. Tantang global ini, akan menekan masyarakat lokal jikalau masyarakat lokal tidak siap untuk menghadapi arus global yang semakin deras alirannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Baso, Ahmad. 1999. *Civil Societi versus Masyarakat Madani: Arkeologi Pemikiran Civil Society dalam Islam Indonesia*, Bandung: Pustaka Hidayah.
- Cohen, L Jean and Andrew Arato. 1992. *Civil Society and Political Theory*, Massachusets: MIT Press.
- Culla, Andi Suryadi. 1999. *Masyarakat Madani: Pemikiran, Teori, dan Relevansinya dengan Cita-cita Reformasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hayness, Jeff. 2000. *Demokrasi dan Masyarakat Sipil di Dunia Ketiga*, Jakarta: Yayasan Obor.
- Keane, Jhon. 1988. *Civil Society and The State: New Eropean Perspectives*, New York: Varso.
- Rahardjo, M. Dawam. 1999. *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah, dan Perubahan Sosial*, Jakarta: LP3ES.
- Suryabrata, Sumadi. 1998. *Psikologi Kepribadian*, Jakarta: Penerbit CV Rajawali .